

**IMPLEMENTASI PASAL 7 PERNA NO 10 TAHUN 2012 DI NAGARI
JAHO KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Ilmu Politik Pada Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



Oleh:

AZHAR EL AHMADY

0910 832 057

Pembimbing:

Dr. Aidinil Zetra, MA

Dewi Anggraini, S.IP., M.Si

**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2016

ABSTRAK

Implementasi Pasal 7 Perna No 10 Tahun 2012 Tentang Kehidupan Beragama Nagari Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Azhar El Ahmady (0910832057), Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, 107 halaman, 2016.

Skripsi ini menjelaskan implementasi peraturan Nagari Jaho No 10 Tahun 2012 Pasal 7 tentang kehidupan beragama, dalam upaya mewujudkan kehidupan nagari yang sesuai dengan syariah Islam. Fenomena yang terjadi adalah kurang patuhnya sasaran kebijakan yaitu para pedagang warung yang tidak mengindahkan himbauan untuk tidak membuka warung setiap ada kegiatan di masjid. Sehingga proses penerapan kebijakan ini tidak berjalan dengan baik.

Secara spesifik bertujuan menganalisis upaya yang dilakukan oleh implementator kebijakan yaitu pemerintah Nagari Jaho dalam menjalankan kebijakan ini. Teori yang digunakan yaitu teori Merilee S. Grindle tentang implementasi kebijakan. Tipe dan pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara mendalam dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan metode purposive sampling. Data yang ditemukan dianalisis dengan menggunakan analisis etik dan emik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Nagari Jaho masih belum berhasil dalam pelaksanaan produk kebijakan tentang kehidupan beragama dalam mewujudkan tatanan kehidupan yang berlandaskan syariah Islam. Adapun upaya yang dilakukan adalah memberikan sosialisasi, memberikan surat himbauan, serta pemberian sanksi secara sosial maupun materi. Kendala dalam proses penerapan kebijakan Pasal 7 Perna No 10 Tahun 2012 ini adalah kurangnya sumber daya manusia dan dana, kurangnya komunikasi serta koordinasi antara aktor-aktor kebijakan, tidak adanya respon dari pemerintah kabupaten dalam hal legalisasi hukum yang diajukan pemerintah nagari untuk produk kebijakan ini, yang menyebabkan kurangnya kekuatan dari implementator untuk menjalankannya, serta kurangnya pengawasan dan ketegasan dari pemerintah Nagari Jaho kepada sasaran kebijakan yakni pedagang warung yang ada di nagari.

Kata Kunci: Implementasi, peraturan nagari, pemerintah nagari, pedagang warung, Jaho.

ABSTRACT

The Implementation of Nagari's Regulation number 10 on 2012 at 7th Article, about Religious Existence at Jaho Village, X Koto District, Tanah Datar Regency. Azhar El Ahmady (0910832057), Political Science Department, Social and Political Science Faculty, Andalas University, 107 pages, 2016.

This research explain the implementation of Nagari Jaho's regulation number 10 at 2012, the 7th article about religious existence, in the order to actualize the people life that appropriate with islamic thought. The phenomena that occur is the inobediently of small shop trader that not obey the instruction to close their shop while the religious agenda happen at mosque. So, the application of this regulation is not work well.

The main point of this research is to analyze the effort that doing by implementator of Nagari Jaho's government in the order to applicate the regulation. This research apply the policy implementation theory by Merilee S. Grindle. The methodology of this research is qualitative with descriptive type. The technique of collecting data is in-depth interview and documentation. The selection of informants use purposive sampling method. The data that found was analyzed with ethic and emic way.

The result of this research show that the goverment of Nagari Jaho cannot implementate the regulation to realize the religious existence by the islamic thought well. The efforts to operate this regulation are to make the socialization, letter of instruction, and also give social and material punishment. The obstacles of this regulation are less of human and fund resources, less of communication and cordination between actors, less respond by the Tanah Datar regency at the order of legalization of this regulation that submitted by Nagari Jaho's goverment and less control of Nagari Jaho's to the people such as small shop trader at the village.

Key Words: Implementation, Nagari's Regulation, Nagari's Government, Small Shop Trader, Jaho.